



Kabar

RBP GCF REDD+ SULTENG OUTPUT2

Edisi Ketiga | 1-31 Oktober 2025

Dinas Kehutanan
Sulawesi Tengah Tingkatkan
Kapasitas Tenaga Teknis
Pengelola Hutan

Penandaan Batas Kelola
Perhutanan Sosial
di Sulawesi Tengah

Cara Perempuan
Memberi Nilai Tambah
Hasil Hutannya



PENGANTAR

Edisi ke-3 newsletter program RBP GCF REDD+ Output 2 di Sulawesi Tengah mengangkat cerita-cerita penguatan kapasitas pengelola hutan, bukan hanya dari sisi aparatur pemerintahnya, melainkan juga masyarakat yang mendapat izin pemanfaatan hutan melalui skema Perhutanan Sosial (PS) dan juga Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Dari sisi aparatur pemerintah, program melakukan peningkatan kapasitas kepada Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANIS PH) serta staf Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Taman Hutan Raya (Tahura), dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah seputar apa saja spesialisasi yang harus dimiliki berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Profesi Dan Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan.

Program juga melalui Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Tim Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di level Kabupaten dan Kota. Ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Pemprov Sulteng dalam menjalankan Perda Nomor 9 Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.

Sementara dari sisi pengelola PS dan KUPS, kegiatan dimulai dengan memfasilitasi tiga kelompok tani hutan (HKm) menyusun dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) tahun 2025 – 2035 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), serta penyusunan peta dan pal penanda batas kelola hutan.

Pada sisi yang lain, KPH Sivia Patuju memulai langkah besar dengan membuat kebijakan afirmasi 30 persen perempuan dalam kegiatan-kegiatannya. Upaya ini tidak hanya berhasil meningkatkan jumlah secara signifikan, dari 10 ke 40 persen dari total peserta kegiatan Adalah perempuan, melainkan juga mereka jadi aktor perubahan signifikan dalam mengelola hasil hutan bukan kayu.

KEMITRAAN selaku Lemtara program RBP GCF REDD+ output 2 yang dilaksanakan oleh BPD LH, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Provinsi Sulteng melihat upaya Bersama yang dilakukan sebagai bagian dari penguatan kapasitas aktor tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah. Karena KEMITRAAN percaya kesejahteraan akan dapat diwujudkan dengan segera jika semua aktor terlibat secara bermakna dalam proses tata kelola pemerintahan sebuah daerah, termasuk di dalamnya keterlibatan perempuan, orang muda, kelompok disabilitas, masyarakat adat serta kelompok disabilitas lainnya.

Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah Tingkatkan Kapasitas Tenaga Teknis Pengelola Hutan.



Bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, KEMITRAAN melaksanakan pelatihan GIS dan spesialisasi kepada Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANIS PH) serta staf Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Taman Hutan Raya (Tahura), dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Pelatihan ini dilaksanakan sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh pengelola hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Profesi Dan Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan.

Pelatihan diikuti oleh 62 orang perwakilan dari 13 KPH, Tahura dan Dinas Kehutanan provinsi. Selain sistem informasi geografis, pelatihan dan sertifikasi juga fokus pada peningkatan kapasitas untuk spesialisasi Pengujian Kayu Bulat (PKB), Pengujian Kayu Gergajian (PKG), Pengujian Kelompok Batang (JIPOKTANG), Pengujian Kelompok Getah (JIPOKTAH) dan Perencanaan Hutan (Canhut).

Pada sambutannya, Sekretaris Dinas Kehutanan Abdul Rahman, S.Hut menyampaikan harapan agar

peserta pelatihan lulus uji kompetensi pada masing – masing bidang yang diikuti.

“Pengetahuan yang didapatkan bisa mendukung kerja – kerja Dinas Kehutanan dalam pengelolaan hutan secara baik, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan nilai ekonomi dalam pemanfaatan Hasil Hutan kayu dan Non kayu serta perlindungan hutan,” harapnya.

Edy Wicaksono Program Manager RBP GCF REDD+ pada sambutannya menyampaikan, kegiatan ini merupakan peningkatan kapasitas personel di Dinas Kehutanan dan KPH untuk memetakan pemanfaatan dan perencanaan pengelolaan hutan lewat bidang – bidang yang akan dilatih seperti Cangkut, PKB, PKH, Jipoktang dan Jipoktah

“Sulawesi Tengah mendapat insentif dana, karena berkontribusi pada penyerapan karbon melalui perbaikan dan penguatan tata kelola hutan. Pelatihan ini bagian dari salah satu untuk mendukung itu,” ucap beliau.



Dorong Pembangunan Rendah Karbon, Bappeda Sulteng Latih Anggota Pokja REDD+



Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Tim Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di level Kabupaten dan Kota. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui aplikasi AKSARA yang diselenggarakan oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Kewilayahan Bappeda bersama KEMITRAAN lewat proyek RBP GCF (*Result Based Payment – Green Climate Fund*).

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk anggota Pokja REDD+ Sulteng dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan aksi pembangunan rendah karbon di wilayahnya.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Subhan Basir dalam sambutannya menegaskan pembangunan rendah karbon menjadi bagian penting dari kontribusi Indonesia terhadap upaya global menekan laju perubahan iklim.

“Pembangunan rendah karbon merupakan strategi pembangunan berkelanjutan dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus meminimalkan eksploitasi sumber daya alam,” katanya.

Menurutnya, komitmen Pemprov Sulteng dalam penurunan GRK dalam kerangka aksi perubahan iklim tercermin dalam dokumen RPJPD 2025–2045 yang ditetapkan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2024.

Program Manager RBP GCF REDD+ Sulawesi Tengah, Edy Wicaksono, menjelaskan AKSARA merupakan aplikasi yang dibangun oleh Bappenas untuk memfasilitasi pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) berdasarkan

data dari Kabupaten/Kota. Melalui pelatihan ini, dia berharap peserta mampu melaporkan serta menyusun sistem basis data terkait tingkat penurunan emisi GRK di wilayahnya masing-masing.

Selama kegiatan, sebanyak 53 orang peserta terdiri dari perwakilan dari Bappeda kab/kota, akademisi dari Universitas Tadulako dan Bidang Arsitektur Pokja REDD+ mendapatkan materi yang disampaikan oleh tiga orang dari Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu: Ibu Ana menyampaikan seputar Kebijakan Penanganan Perubahan Iklim di Indonesia dalam dokumen Perencanaan serta sistem pemantauannya.

Kemudian Ibu Novia Mustikasari dari Sekretariat LCDI Kementerian Lingkungan Hidup menjelaskan seputar bagaimana Menyusun target dan perencanaan emisi GRK yang tertuang dalam dokumen, serta Allan Rosehan selaku Koordinator Pokja Inventarisasi GRK Kementerian Lingkungan Hidup berbagi tips dan trik bagaimana mekanisme pelaporan yang baik.



Penyusunan RKPS dan RKT di 3 HKM yang ada di Kab Tojo Una – Una.



KPH Sivia Patuju di Kabupaten Tojo Una-Una memfasilitasi tiga kelompok tani hutan (HKM) menyusun dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) tahun 2025 – 2035 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) mengacu pada Permenlhk Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Tiga KTH tersebut antara lain Kelompok HKM Harapan Lestari Desa Bongka Makmur, HKM Polopi Desa Bonebae II dan HKM Uejimi Desa Marowo. Ini dilakukan agar mereka memiliki perencanaan pemanfaatan serta pengembangan usaha hutan yang baik.

Penyusunan dokumen RKPS dan RKT melibatkan Kepala KPH Sivia Patuju, Kepala Seksi PPH, Kepala Seksi PKPM dan Penyuluh Kehutanan selaku narasumber dan fasilitator.

Ambar Subekti Shut MP, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan KPH Sivia Patuju menyebut kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan proses pengelolaan hutan di wilayahnya dikelola secara inklusif.

“Kegiatan ini juga memberikan pemahaman tata cara pengelolaan perhutanan sosial dan memastikan bahwa RKPS dijalankan secara partisipatif, inklusif dengan memperhatikan keterlibatan semua unsur seperti kelompok tani, perempuan dan penyandang disabilitas. Selain itu, dokumen diintegrasikan kedalam rencana pembangunan desa sehingga pengelolaan perhutanan sosial berjalan dengan efektif,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok KUPS, Ibu Ratni, menyebut dokumen ini memudahkan mereka menyusun rencana usaha apa yang harus dijalankan, serta menentukan target yang harus dicapai.

Edy Wicaksono Program Manager PMU KEMITRAAN menyampaikan penyusunan dokumen ini merupakan bagian dari peningkatan tata kelola kehutanan dan sejalan dengan SK Gubernur Nomor 500.41/270/Dis.Hut – G.ST/2025 tentang pengembangan perhutanan sosial.

Menurut Edy, lembaganya telah memfasilitasi penyusunan dokumen RKPS dan RKP di 28 dari total 72 kelompok Perhutanan Sosial yang ada di Sulawesi Tengah.



Penandaan Batas Kelola *Perhutanan Sosial* di Sulawesi Tengah



Melalui Program RBP GCF REDD+, 10 KPH di Provinsi Sulawesi Tengah dan KEMITRAAN mendampingi 18 Kelompok Perhutanan Sosial (PS) seluas 8.128 Ha dalam menyusun peta dan pal penanda batas.

Moh Rizal S.Hut dari KPH Pogogul menyebut kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tata batas wilayah kelola PS serta menjaga pemanfaatan hutan tidak keluar dari izin yang telah diberikan.

Kegiatan mulai dari sosialisasi bersama pemerintah desa, diskusi pembagian tim dengan anggota kelompok hingga pemasangan pal di titik koordinat pada peta kerja.

“Semua anggota terlibat, ada yang mengangkut pal, melakukan survey jalur dan menyiapkan logistik. 20 orang anggota terlibat di masing – masing kelompok selama pelaksanaan kegiatan,” ucap Rizal.

Samsudin Boga, Ketua Kelompok HKM Botumeme menyampaikan kegiatan ini memberikan kepastian

bagi kelompok untuk mengelola apa yang bisa dan apa yang tidak boleh dikerjakan.

“Pengelolaan yang selama ini dilakukan seperti penanaman kopi, durian, panen rotan, aren dan ambil pandan hutan untuk anyaman hanya di areal yang berbatasan dengan kebun masyarakat saja. Penandaan batas ini memudahkan kita untuk melakukan pemetaan potensi pemanfaatan yang ada di dalam kawasan PS” ujarnya.

Sementara itu menurut Kiki Rizki Amalia, Project Officer PMU KEMITRAAN, kegiatan ini telah menjangkau 8 persen dari total 218 jumlah kelompok PS yang ada di Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini merujuk pada dua regulasi baik di level nasional maupun provinsi yakni; SK-1188-MENLHK-SETJENKUM-1-12-2022 PEDOMAN PENANDAAN BATAS DAN PEMBUATAN ANDIL GARAPAN PADA AREAL PERSETUJUAN PERHUTANAN SOSIAL, serta SK Gubernur Nomor 500.41/270/Dis.Hut – G.ST/2025 TENTANG PETA JALAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH 2025 – 2029.

Terdapat delapan belas daftar lokasi penandaan pal batas, antara lain:

No	KPH	Jumlah Lokasi	Nama PS	Desa/Kelurahan	Kabupaten	Luasan (Ha)
1	KPH Dolago Tanggunung	2	KTH Harmonis Dolago (HKM) KT Maju Bersama (HKM)	Desa Dolago Desa Saloya	Parigi Moutong	35 608
2	KPH Kulawi	1	LPHD Montikole (HD)	Desa Mantikole	Sigi	531
3	KPH Dampelas Tinombo	2	LPHD Sibualong (HD) LPHD Bondoyong (HD)	Desa Sibualong Desa Bondoyong	Donggala Parigi Moutong	294 968
4	KPH Gunung Dako	2	KTH Matirobulu (HKM) KTH Mogitapido (HKM)	Desa Malulu Desa Pinjan	Toli - Toli	400 222
5	KPH Pogogul	2	LPHD Domag Mekar (HD) Gapoktanhut Botumeme (HKM)	Desa Domag Mekar Kelurahan Kali	Buol	775 243
6	KPH Sintuvu Maroso	2	KTH Kaju ombo (HKM) LPHD Sulewana (HD)	Kelurahan Lembo Mawo Desa Sulewana	Poso	300 175
7	KPH Tepe Asa Maroso	2	KTH Mutiara Hijau (HKM) KTH Lemboea II (HKM)	Desa Lamberea Desa Lauafu	Morowali	200 206
8	KPH Pulau Peling	1	LPHD Usuma (HD)	Desa Popisi	Banggai Kepulauan	294
9	KPH Balantak	2	LPHD Doda Bunta (HD) LPHD Sumber Agung (HD)	Desa Doda Bunta Desa Sumber Agung	Banggai	98 46
10	KPH Banawa Lalundu	2	LD Tinauka Bersatu (HD) LPHD Pantolobete Panmom Jaya (HD)	Desa Tinauka Desa Pantolobete	Kab Donggala	2733 513



Cara Perempuan

Memberi Nilai Tambah Hasil Hutannya



Program RBP GCF REDD+ Output 2 menguatkan komitmen KPH Sivia Patuju dalam mencapai afirmasi 30 persen Perempuan, anak muda dan kelompok rentan yang telah mereka lakukan sejak tahun 2024.

Selama pelaksanaan program yang telah berjalan kurang lebih satu tahun, kegiatan-kegiatan seperti FGD penyusunan rencana kelola hutan, penyusunan dokumen RKPS dan diskusi peningkatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) telah melibatkan sedikitnya 40% dari total peserta merupakan perempuan, kelompok muda dan disabilitas.

Menurut Edy Wicaksono, program manager PMU KEMITRAAN, dukungan program terhadap pengarusutamaan Perempuan dalam kegiatan merupakan bagian dari safeguard lingkungan dan sosial atau ISP 12: KUALITAS SOSIAL MASYARAKAT, KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN KAUM RENTAN.

Sementara itu, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan KPH Sivia Patuju, Ambar Subekti Shut MP menyebut keterlibatan perempuan, anak muda dan kelompok rentan dalam aktivitas mereka telah terbukti membawa ide-ide baru yang inovatif.

Bersama organisasinya, Ambar melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan hutan lestari kepada kelompok LPHD dan HKM di wilayah kerjanya, untuk memfasilitasi pengembangan usaha dan tata kelola kelembagaan PS.

LPHD Sansarino merupakan salah satu kelompok yang didampigi untuk membentuk jaringan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Ibu Ratni terpilih menjadi ketua KUPS di LPHD Sansarino, dengan fokus mengembangkan usaha produk turunan kelapa dan madu hutan.

Dengan alat produksi sederhana, Ibu Ratni bersama anggota kelompok KUPSnya mampu menghasilkan 20 – 30 botol minyak kelapa dan 10 botol minyak Virgin Coconut Oil (VCO) dalam satu kali produksi, dan dipasarkan langsung ke pasar tradisional, titip di kios kelontong warga maupun diikuti di acara pameran.

Upaya Ibu Ratni dan kelompoknya berbuah pada peningkatan kelas kelompoknya, dari Silver ke Gold atau satu tahap lagi mencapai kelas paling tinggi dalam KUPS yakni Platinum. Dengan status tersebut, kelompok usahanya dianggap telah memiliki kemampuan dan pencapaian yang lebih

tinggi, dengan identifikasi potensi usaha yang sudah baik dan beberapa unit usaha yang sudah berjalan.

Tidak hanya mengembangkan produk, ia juga menjadi penggerak aktif anggota kelompok lainnya untuk menggali potensi yang ada di masing-masing.

“Banyak sumber yang dapat menghasilkan dari pemanfaatan hutan, kadang kita tidak sadari, biasanya kelapa hanya dipanen jual ke tengkulak, padahal bisa dikembangkan menjadi produk yang hasilnya bisa melebihi dari harga jual kelapa perbiji, begitupun madu hutan biasanya hanya diambil begitu saja dari dalam hutan, jika dikemas baik maka hasilnya dapat membantu ekonomi kita” terang Ratni.

Atas prestasinya, kini Ibu Ratni hampir selalu dilibatkan sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan pelatihan pengembangan usaha yang dilaksanakan oleh KPH Sivia Patuju. Ceritanya diharapkan dapat memotivasi perempuan-perempuan lain yang terlibat dalam pengelolaan PS bahwa ia bisa berdaya meski bermodal pengetahuan dan alat sederhana.



Produk ekstrak minyak cengkeh

Produk bawang goreng



Produk madu hutan



Produk minyak kelapa



Kabar RBP SULAWESI TENGAH

